

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA BUNTONGI KECAMATAN AMPANA KOTA)

Sri Hardianti¹, Hasan Muhammad dan Muhtar Lutfi²

dianbido@gmail.com

¹*Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaa Pascasarjana Universitas Tadulako*

²*Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako*

Abstract

This study aims to determine and analyze the level of community participation as well as aspects related to the level of community participation in the implementation of rural infrastructure development. The approach used in this study is a qualitative approach with purposive sampling techniques and the data were collected through interviews and delivered questionnaires. Then, the data were analysed by qualitative approach and it was supported by quantitative data. The results of this study show that: First, the level of community participation in the implementation of the program of Village allocation fund) in Buntongi village is still low. Second, the aspects related to public participation in the implementation phase namely the type of employment and income. Meanwhile the level of education only affects the planning stage as well as monitoring and evaluation.

Keywords: *community participation, infrastructure development*

Otonomi daerah yang salah satu agendanya adalah menempatkan desa sebagai basis desentralisasi melahirkan kebijakan alokasi dana desa sebagai wujud dari otonomi desa. Desa sebagai basis desentralisasi sangat beralasan karena sebagian masyarakat hidup dalam komunitas pedesaan. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, desa terkelompok dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintah yang otonom. Selain itu, desentralisasi pada tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhann masyarakatnya. (<http://elkanagoro.blogspot.co.id>)

Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Perpektif ini sangat beralasan karena dari pengalaman historis dan empiris bahwa sesungguhnya desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai swapraja bagi masyarakatnya. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan Karena pada dasarnya masyarakat pedesaan

mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung, melaksanakan dan bahkan mengawasi jalannya program pembangunan. (<http://binaprajajournal.com>)

Adanya pemberian otonomi desa tersebut, berkonsekuensi pula pada pemerintahan daerah diberi kewenangan yang besar dalam mengatur daerahnya termasuk yang berkaitan dengan fiskal. Kebijakan ini paling tidak akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu, pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang lebih rendah (Mardiasmo, 2002:17)

Menurut Putman (1993), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan, termasuk dalam

membangun infrastruktur pedesaan, adalah situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai pula.

Bertolak pada gambaran di atas maka yang menjadi pusat perhatian dan telaah dalam penelitian ini adalah sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan. Secara khusus tahap perencanaan dan implementasi pembangunan yang berlangsung di kecamatan Ampana Kota. Yang mana fokus dalam penelitian ini adalah Desa Buntongi di Kecamatan Ampana Kota.

Keberhasilan pembangunan desa yang berlangsung di desa disamping di tentukan oleh partisipasi masyarakat juga nilai-nilai tradisional yang mendasari keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat digerakan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk yang berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di pedesaan adalah program Alokasi Dana Desa. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat,

kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi di Desa Buntongi jumlah ADD yang diberikan dapat terealisasi sebesar 100%. Tetapi tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan ADD belum maksimal. Hal tersebut tercermin dari sikap masyarakat yang masih kurang terlibat dalam mengajukan ide dan saran di forum musbangdes. Ketidaktahuan sebagian masyarakat atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kurang terlibatnya masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan sehingga dukungan yang diberikan oleh masyarakat tidak maksimal.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka rumusan pertanyaan pada penelitian adalah "Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una?"

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obj, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masyarakat sekarang (Nazir, 2003). Objek penelitian pada penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari alokasi dana desa tahun 2015.

Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya serta pelaksanaan hasil program alokasi dana desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara terhadap informan dianggap

mengetahui permasalahan serta menggunakan kuisioner yang diberikan kepada 30 responden dengan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun wilayah pengamatan yang dipilih yaitu Desa Buntongi. Penentuan ini didasari oleh pertimbangan Desa Buntongi adalah desa baru yang berdiri pada tahun 2014 dan salah satu desa yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa pada tahun 2015.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data – data yang diperoleh dari wawancara dan kuisioner disajikan secara deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan Skala Likert untuk menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Ampana Kota. Hasil wawancara dan kuisioner disajikan dalam bentuk tabel dan teks deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu Partisipasi dalam perencanaan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam pengawasan dan penilaian.

A. Tingkat Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Tahap Perencanaan

Tahap awal yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sosialisasi pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pembina dan dinas atau instansi terkait dengan program ADD ini. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan dan diharapkan dapat pula berpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya, tenaga dan pikiran. Kegiatan sosialisasi program ADD yang dilaksanakan dirasakan sangat penting karena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung akan memberikan kemudahan dan pemahaman ke seluruh warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa. Dalam hal ini perencanaan kegiatannya meliputi musyawarah yang dilakukan di kantor desa. Maka setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah Musyawarah pembangunan tingkat desa (Musbangdes). Mekanisme penyusunan rencana kegiatan pembangunan ditetapkan melalui Musbangdes. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana program alokasi desa serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan diharapkan dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program yang akan dilaksanakan.

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dilakukan pengukuran melalui serangkaian

pertanyaan yang menunjukkan keterlibatan pemilihan masyarakat dalam tahap perencanaan, yakni: kehadiran dalam rapat penyusunan rencana pembangunan; Keaktifan mengajukan usul; keaktifan dalam diskusi rencana kegiatan, dan; Partisipasi dalam pengambilan keputusan penetapan kegiatan pembangunan. Dari 30 responden yang memberikan jawaban 19 orang (73,41%) mengatakan sering hadir dalam rapat penyusunan kegiatan, dan 11 orang (26,59%) mengatakan kurang terlibat dalam rapat penyusunan kegiatan. Sedangkan frekuensi pengajuan usul, 6 orang (31%) aktif dalam mengajukan usul, 16 orang (55,17%) kurang aktif dan 8 orang (13,79%) tidak pernah memberikan usul pada musrenbangdesa. Indikator keaktifan dalam diskusi rencana pemilihan kegiatan pembangunan, satu orang responden (5,43%) menjawab selalu, 13 orang (53,42%) menjawab sering, 14 orang (38,36%) menjawab kadang-kadang dan 2 orang (2,72%) menjawab tidak pernah. Indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan penetapan kegiatan (34,43%) masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (65,67%) responden menjawab rendah turut serta dalam pengambilan keputusan penetapan kegiatan. Berdasarkan keterangan dari beberapa responden, hal ini didasarkan karena pada tahap ini peran serta masyarakat umum sudah diambil alih oleh pelaksana kegiatan yang telah disetujui oleh masyarakat dalam forum musbangdes.

Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan ADD yang dimaksud adalah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan program pembangunan dalam pemanfaatan program alokasi dana desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Sedangkan dalam proses partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Buntongi dapat dilihat dari proses pelaksanaan program alokasi dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan menjelaskan bahwa masyarakat cukup antusias ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan namun ada juga masyarakat yang lebih mementingkan kebun mereka. Kebanyakan warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan hanya warga dusun dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan.

Dari 30 orang responden yang memberikan jawabannya, 7 orang (37,09%) menyatakan berpartisipasi aktif, 14 orang (47,46%) mengatakan terlibat kurang aktif dan 8 orang (15,25%) mengatakan tidak berperan dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan kesediaan secara sukarela dalam kegiatan pembangunan, 8 orang (36,92%) mengatakan secara sukarela berpartisipasi, dan 22 orang (63,08%) menyatakan bahwa masyarakat sering tidak dapat berpartisipasi karena adanya kesibukan lain (pekerjaan)

Pada tahap ini, bentuk partisipasi masyarakat di desa Buntongi yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah sumbangan tenaga yang mencapai 46% atau 14 responden serta sumbangan materi atau dana 16,6% atau 5 responden. Jumlah total presentase dari partisipasi masyarakat yang berkisar 62%.

Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat desa lebih memilih untuk berkontribusi menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan ekonominya.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi adalah masyarakat yang diikutsertakan atau turut berpartisipasi untuk menjaga jalannya kegiatan

pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan adanya evaluasi akan diketahui penyimpangan - penyimpangan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan penilaian akan diambil langkah-langkah kebijaksanaan korektif agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah desa ini cukup tinggi berkenaan dengan keterlibatan menghadiri rapat evaluasi kegiatan pembangunan yaitu (75%). (21,05%) dari seluruh jawaban menunjukkan kategori rendah dan (3,95%) berada dalam kategori sangat rendah. Hasil jawaban responden untuk pertanyaan partisipasi dalam mengajukan usul atau saran pada rapat monev, 7 orang (36,21%) mengatakan sering, 14 orang (48,27%) mengatakan kadang-kadang, 9 orang (15,52%) mengatakan tidak pernah. Implementasi partisipasi dalam melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan dinilai rendah, karena hanya 6 orang (31,58%) dari 30 responden yang menjawab sering, sedangkan 15 orang (52,63%) menjawab kadang-kadang dan 9 orang (15,79%) menjawab tidak pernah. Indikator penilaian terakhir, yakni partisipasi dalam melaporkan bila terjadi penyimpangan pada kegiatan pembangunan. Pada indikator ini partisipasi masyarakat dinilai sangat rendah karena dari 30 responden (57,14%) menjawab jarang atau kadang-kadang dan (42,86%) tidak pernah berpartisipasi.

B. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota sangat bervariasi, tingkat pendidikan di desa ini tergolong masih rendah dengan sekitar 16% dari 701 jumlah penduduk desa telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP sampai dengan SMA dan 1,85% jenjang diploma dan sarjana.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataannya menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Rendahanya pendidikan masyarakat memicu kurang pemahaman masyarakat akan suatu hal apapun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk Desa Buntongi sangat berpengaruh dengan pemahaman masyarakat mengenai program Alokasi Dana Desa. Masyarakat Desa Buntongi lebih banyak yang hanya lulusan sekolah dasar dibandingkan dengan lulusan SMP atau SMA. Hal ini sangat jelas menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai partisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat, khususnya dalam tahap perencanaan dan tahap monitoring dan evaluasi.

Pekerjaan

Pada umumnya perekonomian pedesaan di Indonesia didominasi oleh kegiatan-kegiatan di sektor pertanian. Terminologi

desa pun sering dipahami sebagai wilayah yang memiliki areal pertanian. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Buntongi mayoritas sebagai petani (ladang) pekerjaan ini sangat menyita waktu masyarakat karena bila musim ladang pada pagi hari sudah beraktifitas dengan benar pulang pada siang hari sehingga membuat mereka lelah. Selain itu juga masyarakat sibuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga dengan menghabiskan banyak waktu sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengikuti pelaksanaan pembangunan di Desa.

Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada bahwa pekerjaan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat khususnya pada tahap pelaksanaan.

Pendapatan/Penghasilan

Hubungan antara pendapatan/penghasilan dalam pembangunan terletak pada bentuk sumbangan materi/dana. Berdasarkan penghasilan masyarakat yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping pendapatan/penghasilan yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Hal tersebut ditegaskan oleh informan yang diinterview secara langsung.

Maka diketahui bahwa penyebab tingkat partisipasi adalah perbedaan jumlah penghasilan dan kestabilan dari pada masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk partisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula. Akan tetapi jika penghasilan/pendapatan tidak stabil atau tidak rutin maka jelas akan menghambat orang untuk berpartisipasi, alasan lain yang diperoleh sehingga informan jarang atau tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk uang (dana) karena biasanya perhitungan hidupnya

lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada, bahwa pendapatan atau penghasilan seseorang memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang kurang tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dengan baik pula, karena waktu yang ada dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga waktu untuk berpartisipasi kurang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah atau kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat ditinjau dengan sebagian masyarakat memberikan jawaban rendah terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator yang penulis ajukan. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah disebabkan karena masih kurang pemahannya masyarakat desa akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut. Sedangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari, pekerjaan serta penghasilan/pendapatan berhubungan erat dengan partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan sedangkan pendidikan berhubungan dengan partisipasi pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi

1. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguana di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota yang kategorinya rendah, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah untuk merangsang masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Bagi pihak aparaturnya desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka dalam alokasi dana desa dan juga agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta

Wasistiono, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media. Bandung

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Hasan Muhammad M.Si., selaku Ketua Tim Pembimbing dan Bapak Dr. Muhtar Lutfi, S.E., M.Si., selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah mencurahkan waktu, perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan tesis ini selesai.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambar, Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arikunto S. 1997. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Baratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Khairudin, 2002. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty. Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Slamet, Y. 2004. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Subejo, 2004. *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. UGM. Yogyakarta
- Sugiarto, 2000. *Teknik Sampling*. Gramedia. Bandung